

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan



Gambar 2.1 Sejarah Pekerjaan Umum

(Sumber: pu.go.id)

Pada **Gambar 2.1** di atas mengutip dari website pu.go.id. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan pengertian dari bahasa negara belanda open bare warken dan baru dikenalkan secara resmi pada tahun 1942 terhadap negara Indonesia. Pada saat itu hindia belanda masih diduduki oleh pemerintahan jepang, yaitu Doboku. yang dimaksud dengan pekerjaan umum ialah pekerjaan atau hal hal yang menyangkut dengan

1. Jalan raya, jembatan dan pengawasan atau keamanan.
2. Pengairan air sawah, saluran air untuk kesehatan dan air minum.
3. Bangunan gedung dan rumah, pemerintah,
4. Pengaturan pada perairan umum, pengendalian air sungai, danau dan muara.
5. Pembangkit tenaga air untuk listrik.



Gambar 2.2 Pada Zaman Jepang

(Sumber: pu.go.id)

Pada **Gambar 2.2** sekitar tahun 1940 struktur organisasi pemerintahan Belanda dikatakan sebagai pemerintahan tertinggi dipimpin oleh raja Gubernur General, berpusat di Batavia Indonesia. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pemuda Indonesia mulai merebut kekuasaan pemerintahan Jepang maupun daerah. Indonesia langsung membentuk kabinet pertama. Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat dipusatkan pada Kota Bandung, di mana tempat yang sudah pernah digunakan atau bekas Gedung V & W dikenal sebagai Gedung Sate. Setelah Perang Pasifik antara sekutu melawan Jepang pada Maret 1942 pemerintah Belanda menyerah dan pada saat itu mulai wilayah Indonesia berada di bawah tangan pemerintahan Jepang. Struktur pemerintahan Jepang sebagian militer membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian yaitu:

- Pemerintah militer angkatan darat pada Kota Jakarta untuk Jawa dan Madura.
- Pemerintah militer angkatan darat pada Kota Bukit Tinggi untuk Sumatra.
- Pemerintah angkatan laut pada Kota Makassar untuk bagian wilayah Indonesia timur yaitu Kalimantan dan Sulawesi.

Setiap wilayah dipimpin oleh seorang gunseikan yang disebut saiko sikikan dan berdiri sendiri. Organisasi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada daerah kepresidenan pada umumnya yaitu berdiri sendiri. Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah Jawa. Tenaga pada pimpinan-pimpinan Belanda seluruhnya tergantung posisi oleh Jepang dan Indonesia. Sistem pelaksanaan pekerjaan umum dan perumahan rakyat masih menggunakan struktur Belanda, tidak dipegang seutuhnya lagi pembangunan gedung-gedung pemerintah oleh organisasi karena disebabkan oleh mutu pekerjaan tidak diperhatikan lagi dan mulai mundur, semua sudah ditujukan hanya untuk perang terhadap Belanda.



Gambar 2.3 Tahun 1950
(sumber: google)

Pada **Gambar 2.3** Pada tahun 1945-1950, menggambarkan selesainya perang Pasifik, kebangkitan bangsa dari jajahan bangsa yang sudah merdeka. Pembentukan pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang presiden yang ditempatkan pada kota Jakarta dan tentara sekutu Inggris datang untuk berkunjung pengakuan De Facto oleh sekutu kepada pemerintah Republik Indonesia dan perjuangan untuk mempertahankan pemerintahan yang terbentuk atas Undang-Undang Dasar (UUD) terdiri dari 8 provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara. Phase ini

menggambarkan organisasi pekerjaan umum dari zaman kolonial, perjuangan mereka berdaulat yang mengatur penyerahan sebagian dari kekuasaan pusat kepada pemerintah otonom provinsi yang disempurnakan. Ketentuan tugas-tugas dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya berpedoman pada Undang Undang Dasar 1945 (UUD). Tugas dan kekuasaan yang diserahkan itu meliputi pembinaan obyek jalan, pengairan dan gedung untuk kepentingan lingkungan pada setiap provinsi.



Gambar 2.4 Foto PUPR
(Sumber: pu.go.id)

Pada Error! Reference source not found. diatas sejak tahun 1959 setelah ada dekrit presiden untuk kembali ke Undang Undang Dasar maka diadakannya jabatan menteri muda pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dibawah menteri inti. Berdasarkan suatu surat edaran pemerintah nama kementrian diganti dengan nama departmen, struktur departmen mengalami perubahan menteri dibantu oleh staff, biro menteri dan membawahi jabatan orang orang. Istilah baru Bina Marga dan Cipta Karya menggantikan nama tempat yaitu jalan,jembatan dan gedung masing masing departmen dipimpin oleh menteri dan juga beberapa pembantu menteri. Jabatan Departmen bina marga dan cipta karya dijadikan direktorat dibawah Jenderal Pekerjaan Umum.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Gambar 2.5 Logo PUPR
(Sumber: pu.go.id)

Berikut merupakan makna logo, warna dan arti simbolis dari **Gambar 2.5** diatas:

2.1.1. Makna Logo

1. Menggambarkan kewajiban Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menciptakan Infrastruktur yang bertanggung jawab dalam membangun Indonesia, mandiri, dan gotong royong.

2.1.2. Warna

1. Warna Kuning (kuning Kunyit) merupakan keagungan, ketuhanan, kemakmuran, menggambarkan fungsi dan peran pembangunan pada PUPR.
2. Warna Biru hitam merupakan keadilan sosial, Keteguhan dan ketegasan dalam bertindak.

2.1.3. Arti Simbol

1. Baling-Baling
 - Bagian Baling-Baling yang mengarah atas mengartikan pembangunan perumahan pemukiman.
 - Bagian Lengkungnya Dari Daun Baling-Baling Memberikan perlindungan untuk ruang kerja dan tempat tinggal bagi manusia.
 - Bagian Daun Baling-Baling Yang Mengarah Ke Kiri Dengan Bagian Lengkungnya Yang Telungkup. Menggambarkan penguasaan bumi dan alam dan pengusahaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Garis Horizontal: bentang jalan jembatan di atas sungai sebagai usaha untuk pembukaan dan pembinaan daerah.
 - Bagian Daun Baling-Baling yang Mengarah Ke Kanan.

- Bagian lengkungnya yang terlentang menggambarkan usaha pengendalian dan penyaluran untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Garis Horizontal: Menggambarkan penampang dari saluran air

3. Baling-Baling 3 Daun

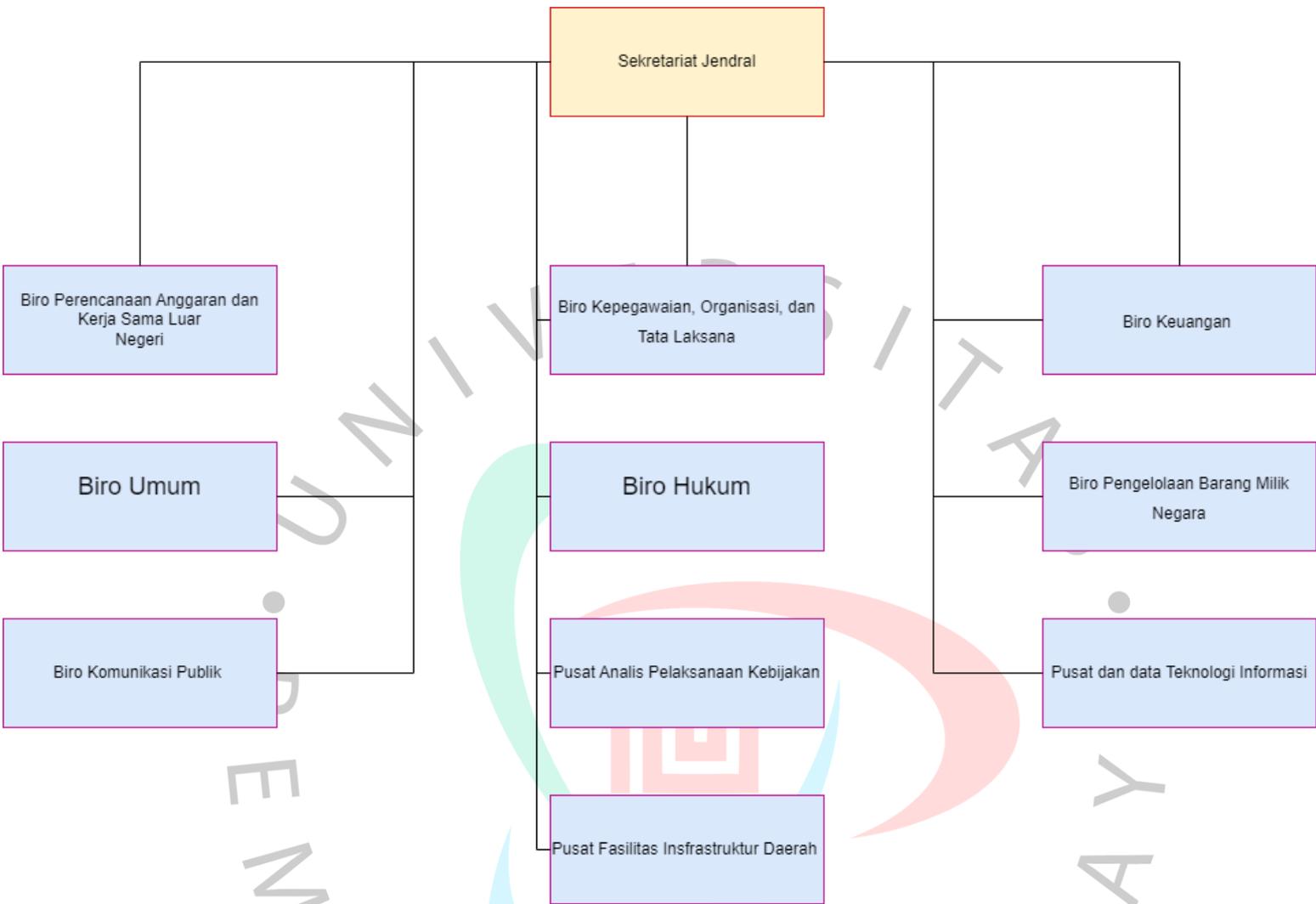
- Tiga komponen susunan pupr yaitu: Tirta, Balai, dan Jenis.
- Gagasan kerja keras, gerak sigap, dan berkehendak akurat.

Menurut dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 perihal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bertindak urusan pemerintah pada bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam mewujudkan pemerintahan negara.

2.2 Struktur Organisasi

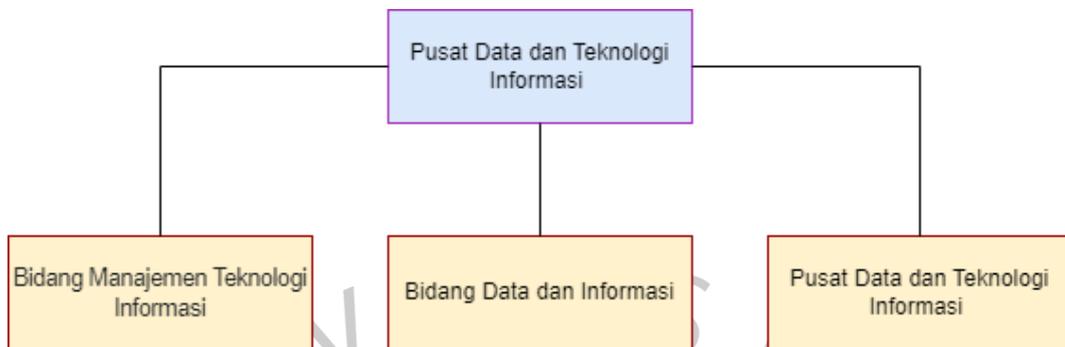
PUPR dipimpin oleh menteri yang di bantu sekretariat Jendral. Untuk kegiatan operasional sekretariat jendral terdiri dari:

1. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri.
2. Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.
3. Biro Keuangan.
4. Biro Umum.
5. Biro Hukum.
6. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara.
7. Biro Komunikasi Publik.
8. Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan.
9. Pusat dan data Teknologi Informasi.
10. Pusat fasilitas Infrastruktur Daerah.



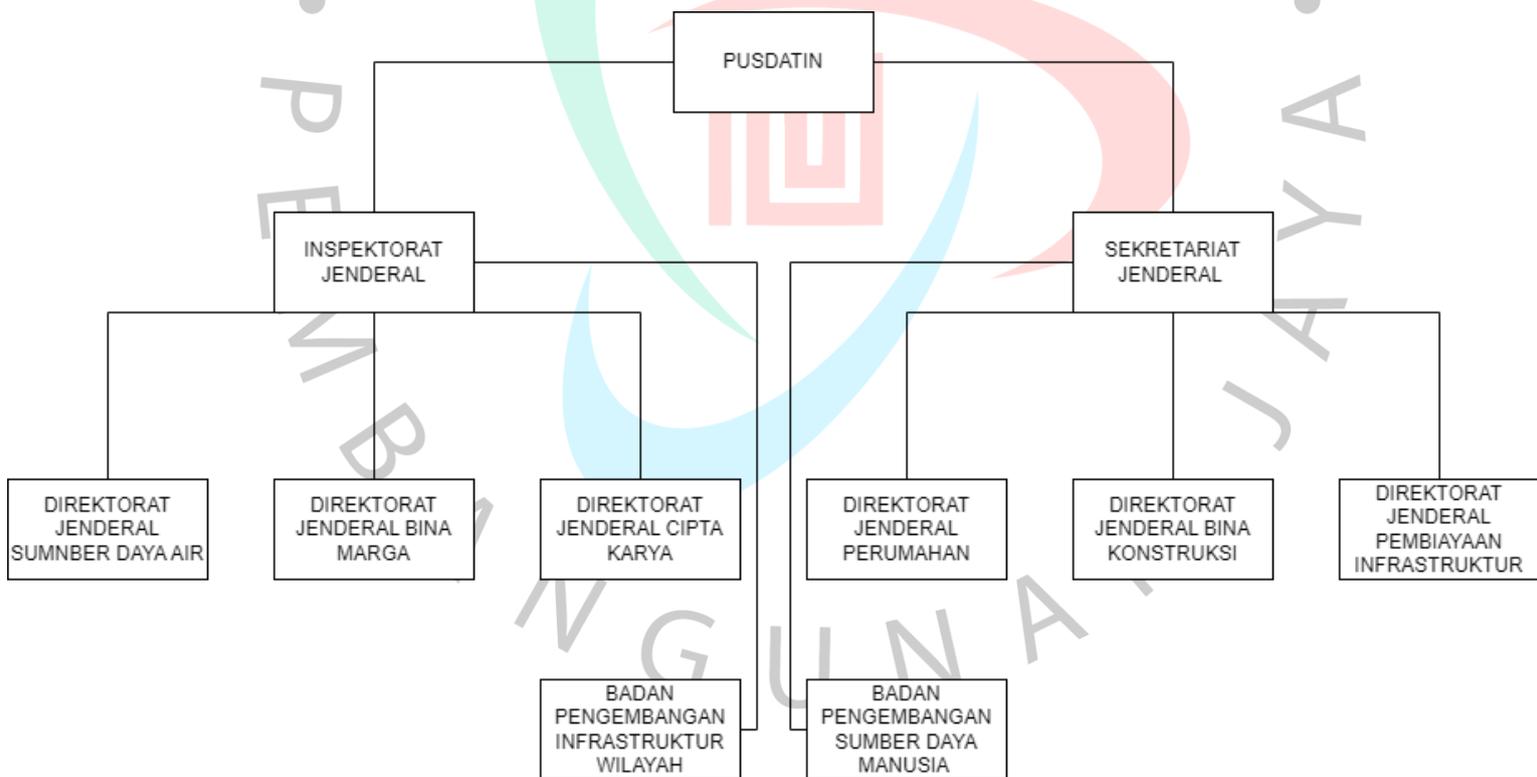
Gambar 2.6 Struktur Organisasi PUPR
(Sumber: pu.go.id)

Pada **Gambar 2.6** diatas merupakan struktur organisasi Sekretariat Jendral yang dipimpin oleh menteri dan dibantu oleh SekJen. Dibawah ini merupakan struksur pada Pusat Data dan informasi sebagai berikut:

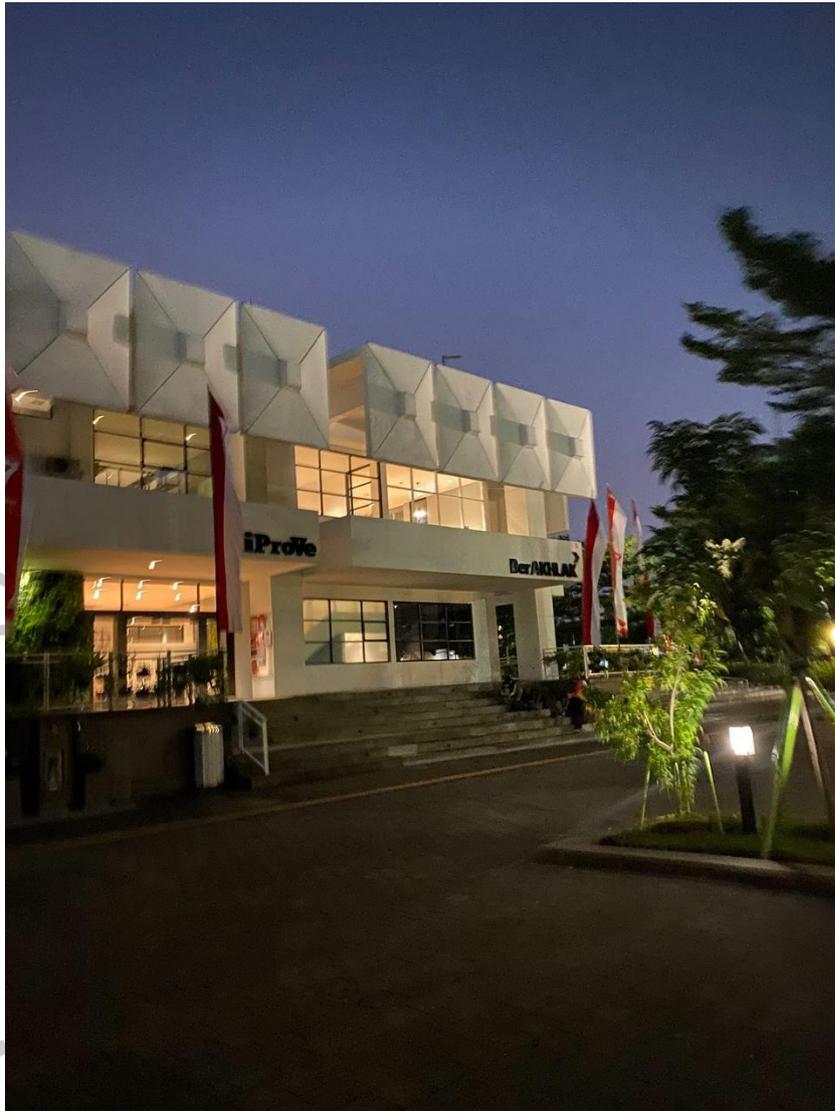


Gambar 2.7 Struktur Organisasi PUSDATIN
(Sumber: pu.go.id)

Dari **Gambar 2.7** diatas terdiri dari beberapa struktur bagian nama gedung dan penempatan pekerjaan Praktikan di Pusdatin, untuk struktur terdapat pada **Gambar 2.8** dibawah ini:



Gambar 2.8 Struktur Bagian PUSDATIN
(Sumber: pu.go.id)



Gambar 2.9 Kantor PUSDATIN
(Sumber: Dokumentasi Praktikan)

1. PUSDATIN

Dari **Gambar 2.9** diatas merupakan Pusat Data dan informasi yang memiliki fungsi:

- a) Penanganan gangguan jaringan, layanan bantuan teknis apabila terjadi gangguan akses terhadap *Internet* pada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b) Pemasangan jaringan kabel atau nirkabel, layanan atau bantuan teknis mulai dari survei lokasi,

memberikan konsultasi, instalasi dan konfigurasi perangkat jaringan kabel.

c) Layanan penanganan insiden keamanan *Siber*.

2. Sekretariat Jendral.



**Ir. Mohammad Zainal
Fatah**

Gambar 2.10 Jabatan
(Sumber: pu.go.id)

Pada **gambar 2.10** diatas merupakan ketua dari Sekretariat Jendral, bertugas sebagai:

- a) Koordinasi dan penyusun rencana, program dan anggaran Kementrian.
- b) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- c) Penyelenggaraan pengelola barang milik negara

3. Inspektorat Jendral.



Ir. T. Iskandar, M.T.

Gambar 2.11 Jabatan
(Sumber: pu.go.id)

Pada **gambar 2.11** diatas merupakan ketua dari Inspektorat Jenderal, bertugas sebagai:

- a) Pemeriksaan intern di kawasan pu terhadap tenaga dan keuangan.
 - b) Implementasi tata laksana Inspektorat.
 - c) Penyusunan tuntutan konsekuensi di kawasan pupr.
4. Ditjen Sumber Daya Air.



Ir. Jarot Widyoko Sp-1

Gambar 2.12 Jabatan
(Sumber: pu.go.id)

Pada **gambar 2.12** diatas merupakan ketua dari Ditjen Sumber Daya Air

5. Ditjen Bina Marga.



**Dr. Ir. Hedy Rahadian,
M.Sc.**

Gambar 2.13 Jabatan
(Sumber: pu.go.id)

Pada **gambar 2.13** diatas merupakan ketua dari Bina Marga, bertugas sebagai:

- a) Perumusan kebijakan pada bidang penyelenggara jalan sesuai ketentuan peraturan.
- b) Menyusun norma, standar dan prosedur kriteria di bidang penyelenggaraan jalan sesuai peraturan undang-undang.
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyelenggaraan jalan.

6. Ditjen Cipta Karya.



**Ir. Diana Kusumastuti,
M.T.**

Gambar 2. 14 Jabatan
(Sumber: pu.go.id)

Pada **gambar 2.14** diatas merupakan ketua dari Ditjen Cipta Karya.

7. Ditjen Perumahan.



Iwan Suprijanto, S.T., M.T.

Gambar 2.15 Jabatan
(Sumber: pu.go.id)

Pada **gambar 2.15** diatas merupakan ketua dari Ditjen Perumahan, bertugas sebagai:

- a) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan.
 - b) Pelaksaaan administrasi Direktorat Jendral Perumahan.
 - c) Pelaksaaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan perumahan.
8. Ditjen Bina Konstruksi.



**Ir. Yudha Mediawan
M.Dev.Plg.**

Gambar 2.16 Jabatan
(Sumber: pu.go.id)

Pada **gambar 2.16** diatas merupakan ketua dari Bina Konstruksi, bertugas sebagai

- a) Perumusan kebijakan pembinaan jasa konstruksi.
- b) Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi.
- c) Pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa Kementrian.

9. Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.



**Dr. Ir. Herry Trisaputra
Zuna S.E., M.T.**

Gambar 2.17 Jabatan
(Sumber: pu.go.id)

Pada **gambar 2.17** diatas merupakan ketua dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

10. Badan ekspansi SDM.



**Dr. Ir. H. Khalawi. AH,
MSC. MM**

Gambar 2.18 Jabatan
(Sumber: pu.go.id)

Pada **gambar 2.18** diatas merupakan ketua dari Badan ekspansi SDM.

11. Badan Pengatur Jalan Tol.

- a) Merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri.
- b) Persiapan perusahaan jalan tol yang meliputi analisa kelayakan finansial, studi kelayakan dan persiapan amdal.
- c) Pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian perusahaan jalan tol dan melaporkan kepada Menteri.
- d) Pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Menurut Keputusan kepemimpinan negara Nomor 27 pada Tahun 2020 tentang Kementerian pu pr mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk membantu pemimpin negara dalam penyelenggaraan pemerintah negara bagian Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, tugas tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Konstruksi dan Perumahan Rakyat:

1. Perumusan, pengaturan dan mewujudkan kewajiban manajemen sumber tenaga air, pengelolaan lalu lintas, penggunaan air bersih untuk kesehatan, pengelolaan limbah rumah tangga, pengelolaan lingkungan dan pembuangan limbah, tata pembangunan, perencanaan wilayah pemukiman, implementasi kawasan strategis, sarana infrastruktur, implementasi pembangunan, melakukan penagihan infrastruktur untuk pu dan pembangunan perumahan dan pengembangan tenaga kerja pembangunan.
2. Mengkoordinasi penerapan tanggung jawab, pelatihan dan dorongan admin untuk semua bagian institut di lingkungan.

3. Perawatan barang properti negara selaku kewajiban.
4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan umum dan tugas Kementerian.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan.
6. Melakukan penjabaran petunjuk proses dan konsep terintegrasi program pengembangan pupr berdasarkan pendekatan pembangunan lingkungan.
7. Implementasi tenaga kerja setiap manusia pada instansi pu.
8. Terlaksananya dukungan material bagi seluruh bagian organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan pelaksanaan tugas lain yang dibentuk.

